

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Islam

Islam merupakan agama yang membebaskan, agama bagi seluruh umat, yakni membebaskan masyarakat dari sisi ketidak-adilan, kemiskinan dan kebodohan. Agama menjadi jawaban bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh umatnya. Dalam konteks inilah, pemberdayaan masyarakat Islam diletakkan dengan cara memfasilitasi, memberdayakan umat Islam agar terhindar dari kemiskinan, ketidak-adilan serta kebodohan yang menyebabkan mereka terpuruk.

Pemberdayaan berasal dari akar kata “daya” yang diberi tambahan atau ditambah awalan kata “ber” yang berarti mempunyai daya. Daya dapat dikatakan sebagai arti kekuatan atau tenaga, maka arti kata berdaya ialah mempunyai kekuatan ataupun tenaga.¹ Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian dan terlepas dari kemiskinan.

Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu perspektif *pluralis*, *elitis*, *strukturalis*, dan *post-strukturalis*.² Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai masyarakat dalam membangun paradigma yang baru mengenai pembangunan yang bersifat manusia terfokus, partisipatif, pemberdayaan dan berkelanjutan.³

Menurut Jim Ife konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni, konsep *power* (daya) dan konsep *disadantaged* (ketimpangan). Sedangkan menurut Agus Ahmad Syafi'i, pemberdayaan dapat diartikan sebagai penganut, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat

¹ Dedeh Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 1.

² Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 25

³ Munawarah Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume 1 No 2 Juli 2011, 1. <http://core.ac.uk>

dipadukan dengan istilah pengembangan.⁴ Menurut Eddy Papilaya pemberdayaan adalah upaya pembangunan kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan maupun merealisasikan potensi yang ada menjadi tindakan yang nyata.⁵

Dari beberapa definisi tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan merupakan suatu kemampuan atau kekuatan dalam merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan makmur. Pemberdayaan merupakan suatu usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dengan tujuan untuk merubah masyarakat dan menjadikan masyarakat agar bisa menyelesaikan suatu permasalahan dan menciptakan sebuah kreasi yang inovatif.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat Islam adalah upaya sistematis dan terencana untuk membawa perubahan sosial menjadi tatanan sosial yang lebih baik berdasarkan ajaran Islam. Pemberdayaan masyarakat Islam adalah bagian dari dakwah. Namun, kegiatan dakwah mengalami pergeseran paradigma.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperkuat kekuatan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal maupun eksternal.

Beberapa kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1) Lemah secara struktural, artinya lemah secara kelas yaitu masyarakat dengan kelas sosial ekonomi rendah, gender maupun etnis (kelompok minoritas) yang mendapatkan perlakuan kurang/tidak adil.
- 2) Lemah secara khusus, seperti manula, anak-anak, remaja, penyandang cacat, bahkan masyarakat yang terasingkan.

⁴ Agus Ahmad Syafi'i, *Manajemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2015), 70.

⁵ Eddy Papilaya, *Pembangunan Alternatif: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pustaka Cisendo, 1996), 145.

3) Lemah secara personal, seperti orang-orang yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.⁶

Menurut Mardikanto dan Poerwoko, tujuan pemberdayaan yaitu meliputi berbagai upaya perbaikan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*), yaitu pemberdayaan dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
- 2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), yaitu pemberdayaan diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas terhadap sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan/keuangan, penyedia produk, peralatan dan lembaga pemasaran.
- 3) Perbaikan tindakan (*better action*), yaitu pemberdayaan diharapkan dapat melahirkan tindakan-tindakan yang lebih baik melalui berbagai macam fasilitas sumber daya.
- 4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*), yaitu pemberdayaan diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan masyarakat menjadi lebih kuat.
- 5) Perbaikan usaha (*better business*), yaitu pemberdayaan diharapkan dapat memperbaiki usaha/bisnis yang dijalankan.
- 6) Perbaikan pendapatan (*better income*), yaitu pemberdayaan diharapkan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh.
- 7) Perbaikan lingkungan (*better environment*), yaitu pemberdayaan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan baik secara fisik maupun sosial.
- 8) Perbaikan kehidupan (*better living*), yaitu pemberdayaan diharapkan dapat memperbaiki situasi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
- 9) Perbaikan masyarakat (*better community*), yaitu pemberdayaan diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik serta didukung oleh lingkungan secara fisik dan sosial.⁷

⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 60.

⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 111-112.

c. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah acuan untuk agen pemberdayaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar agar masyarakat mampu meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih berdaya dan hidup mandiri. Mathews mengemukakan bahwa “prinsip merupakan suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan serta melaksanakan kegiatan secara konsisten”.⁸

Adapun prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Anwas adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan masyarakat dilakukan tidak dengan unsur paksaan dan penuh keikhlasan, karena setiap masyarakat yang akan diberdayakan memiliki problem, kebutuhan, dan potensi yang berbeda sehingga memiliki hak yang sama dalam pemberdayaan.
- 2) Setiap pemberdayaan masyarakat sebaiknya berdasarkan pada problem, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki oleh sasaran pemberdayaan tersebut.
- 3) Sasaran utama dalam pemberdayaan adalah masyarakat, oleh sebab itu masyarakat harus dijadikan pelaku utama dalam kegiatan pemberdayaan.
- 4) Menumbuhkan kembali budaya-budaya dan kearifan lokal.
- 5) Dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
- 6) Memperhatikan keragaman karakter , budaya, tradisi yang telah melekat dalam diri masyarakat.
- 7) Memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat.
- 8) Tidak ada unsur pemecahan, terutama pada perempuan.
- 9) Selalu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- 10) Menggerakkan keikutsertaan masyarakat dalam berbagai bentuk, baik fisik (materi, tenaga, dan

⁸ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif kebijakan Publik*, 107.

bahan) maupun non fisik (saran, waktu, dan dukungan).

11) Agen pemberdaya bertindak sebagai fasilitator.⁹

d. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang lemah atau kurang berdaya, yang mana dalam pemberdayaan masyarakat tersebut terdapat beberapa tahapan agar kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik.

Tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Tahapan penyadaran dan pembentukan perilaku sadar serta peduli. Tahap pertama ini merupakan tahapan awal atau tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahapan ini, pihak pemberdaya atau pelaku (*actor*) pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi agar dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif sehingga dapat menciptakan kesadaran mereka tentang pentingnya memperbaiki kondisi untuk masa depan yang lebih baik.
- 2) Tahapan transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan dan kecakapan keterampilan. Tahap kedua ini merupakan tahapan di mana pemberdaya memberikan wawasan dan keterampilan dasar kepada masyarakat agar terampil sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan nantinya. Pada tahapan ini, masyarakat hanya memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek dalam pembangunan, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.
- 3) Tahapan peningkatan kemampuan intelektual. Tahap ketiga ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan yang diperlukan agar masyarakat membentuk kemampuan kemandirian, sehingga mampu melahirkan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi dalam lingkungannya. Pada tahap ketiga ini,

⁹ Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2014), 58-60.

masyarakat berkedudukan sebagai subyek pembangunan.¹⁰

e. Strategi Pemberdayaan

Strategi yang dapat ditempuh untuk memberdayakan masyarakat ada 3 strategi yaitu: *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang meningkatkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap masyarakat mampu memiliki potensi yang dapat dikembangkan. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam pemberdayaan ini, upaya pemberdayaan memiliki peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, lapangan kerja, pasar dan informasi. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana, seperti jalan, irigasi, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat. *Ketiga*, memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses ini pemberdayaan harus dicegah untuk menjadi bertambah lebih baik. Karena perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah dalam mendasar sifatnya dengan pemberdayaan masyarakat.¹¹

Menurut Edi Suharto, strategi pemberdayaan dibedakan menjadi 3 yaitu¹²:

1) Arus Mikro

Pemberdayaan arus mikro ini dilakukan kepada klien secara individu dengan melalui pelatihan atau pendampingan konseling. Tujuannya yaitu untuk melatih klien dalam melaksanakan tugas kehidupan.

2) Arus Mezzo

Pemberdayaan ini dilakukan kepada sekelompok klien. Pemberdayaan kelompok ini digunakan untuk intervensi media utama. Strategi juga dapat menumbuhkan pengetahuan serta keterampilan dan

¹⁰ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2017), 83-84.

¹¹ <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131474282/pengabdian/PEMBERDAYAAN+M+ASYARAKAT.pdf> Diakses pada tanggal 28 Juni 2022 Pukul 16:42

¹² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 66-67.

sikap klien sehingga mereka dapat memecahkan permasalahannya secara mandiri yakni dengan cara memberikan pelatihan, dinamika kelompok dan pendidikan.

3) Arus Makro

Pemberdayaan dalam arus makro disebut sebagai strategi dalam system yang besar, karena target perubahan diarahkan pada system lingkungan yang luas. Perencanaan sosial, kampanye aksi sosial manajemen konflik dan pengorganisasian dengan kelompok adalah strategi utama dalam pemberdayaan arus makro ini. Strategi sistem besar lebih memandang klien yang dapat mengatasi permasalahannya secara mandiri dalam menghadapi situasi sehingga mereka juga dapat menentukan strategi yang tepat dalam bertindak.

f. Analisis Metode PRA

Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah kajian penelitian atau penilaian desa secara partisipatif. Secara sederhana, PRA dapat diartikan sebagai teknik penyusunan dan pengembangan program operasional yang diperuntukkan membangun perdesaan.

Participatory Rural Appraisal diartikna sebagai pengkajian keadaan desa. Kajian bisa berbentuk kegiatan penelitian yang meliputi aspek kehidupan masyarakat. Kajian yang dapat dilakukan bermacam-macam, tergantung aspek dan kebutuhan, bisa mengambil aspek perekonomian masyarakat di bidang pertanian, potensi SDA/SDM dan bisa juga non pertanian, bahkan, bisa juga mengambil dari kehidupan sosial-budaya masyarakat, pendidikan, kesehatan hingga kehidupan politik. Pada prinsipnya, hasil dari kajian tersebut menghasilkan tiga hal, sebagai berikut:

- 1) Memperoleh informasi terkait kondisi kehidupan di daerah/desa tersebut.
- 2) Memperoleh informasi terkait dengan kebutuhan dan “permasalahan” yang menjadi masalah/kendala masyarakat itu sendiri.

- 3) Memperoleh informasi terkait dengan potensi lokal yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan SDA dan SDM untuk masyarakat sekitar.¹³

Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah suatu metode pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa. Atau dengan kata lain dapat disebut sebagai kelompok metode pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, membuat rencana dan bertindak (Chambers, 1996).¹⁴

g. Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA)

Pendekatan program Participatory Rural Appraisal (PRA) dianggap sebagai program yang efektif dan praktis diterapkan. Alasannya sederhana, karena PRA berjalan didasari dengan prinsip dan teknik terapan. Prinsip dan teknik terapan dapat digunakan untuk mengarahkan masyarakat terkait secara langsung dan berpartisipasi. Fasilitator atau orang luar pimpinan lembaga atau penelitian akademis yang bertugas menjalankan program. Orang luar bukan sebagai pemeran utama, melainkan sebagai pendamping. Pemeran utama program PRA adalah masyarakat desa. Berikut adalah beberapa sistem pendekatan PRA yang sering digunakan.

1) Sistem *Top Down*

Sistem *top down* memiliki dasar program *need assessment* (penyajangan kebutuhan) masyarakat berdasarkan survei. Survei yang dilakukan oleh tim peneliti akademis inilah yang perlu digaris bawahi, karena survei sifatnya tidak melibatkan masyarakat secara total. Sekalipun masyarakat dilibatkan, hanya sebagian kecil saja dan tidak dapat mewakili kasus yang terjadi di lapangan yang sebenarnya.

Anggota masyarakat yang sifatnya pasif, jadi yang berperan aktif adalah tim peneliti akademis (termasuk orang luar). Sistem pendekatan program PRA yang dilakukan oleh tim peneliti akademis yang lebih dominan

¹³ Ahmad Muhsin, Laila nafisah, “*Participatory Rural Appraisal (PRA) For Corporate Social Responsibility (CSR)*”, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 3.

dalam membuat program kerja disebut dengan sistem *top down*.

Kelemahan sistem *top down*, masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, hanya bersifat pasif. Masyarakat hanya menjalankan program yang diberikan kepada pelaksana program. Dampak masyarakat yang pasif menghasilkan inkonsisten. Dengan kata lain, program yang diharapkan membantu masyarakat mandiri, justru tidak membuat mereka tidak mandiri.

2) Sistem *Bottom up planning*

Hasil tidak mandirian masyarakat pedesaan ketika diberlakukan sistem *top down* melahirkan evaluasi. Evaluasi yang dihasilkan agar masyarakat yang dibantu dapat mandiri, tidak manja. Kemudian melahirkan sistem *bottom up planning*, dimana perencanaan ini dilakukan dari masyarakat sebagai awal pembangunan masyarakat. Masyarakat itu sendiri dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat pun lebih mandiri tidak tergantung pada *top down*, tidak tergantung pada pendamping¹⁵

h. Metode dan Langkah-langkah PRA

Metode dan langkah-langkah yang ditempuh, terutama dalam pengumpulan dan analisis data mengikuti metode-metode yang lazim dimanfaatkan dalam PRA (Chambers 1999: 36-39), antara lain:

- 1) Pengumpulan sumber sekunder, berupa berkas, laporan, peta, foto, artikel, buku, catatan resmi.
- 2) Mewawancarai informan kunci, untuk mengetahui secara mendalam mengenai persoalan dan masalah dalam masyarakat.
- 3) Melakukan wawancara semi-terstruktur, memperoleh *checklist* yang terbuka dan mungkin, *unpredictable*.
- 4) Melakukan pertemuan dan wawancara dengan kelompok dan jenis serta kepentingan.
- 5) Membuat model dan peta secara partisipatif, bersama masyarakat terkait dengan pendidikan dan pelatihan budidaya kopi arabika.

¹⁵ Ahmad Muhsin, Laila nafisah, “*Participatory Rural Appraisal (PRA) For Corporate Social Responsibility (CSR)*”, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 4.

- 6) Membuat diagram secara partisipatif, metode untuk identifikasi kelompok dan lembaga penting di dalam dan bagi komunitas, serta hubungan mereka.
- 7) Estimasi dan kuantifikasi, dapat menggunakan ukuran lokal dalam keberhasilan pendidikan dan pelatihan.
- 8) Analisis dan penyajian, peta, model, diagram, penemuan yang disajikan oleh warga atau warga peneliti, yang diuji, dikoreksi dan diskusikan.
- 9) Perencanaan partisipatif, pembuatan anggaran dan pemantauan, warga menyiapkan rencana (jika mungkin sampai pada anggaran, jadwal dan pembuatan perkembangan).
- 10) Kuesioner sederhana pada akhir proses, dirancang untuk pengisian tabel untuk laporan atau yang akan dibutuhkan kemudian.
- 11) Laporan tertulis oleh fasilitator dan/atau bersama warga, setelah kegiatan atau PRA.¹⁶

i. Tujuan Participatory Rural Appraisal (PRA) Untuk Masyarakat

Participatory Rural Appraisal (PRA) memiliki tujuan akhir, yaitu menjangkau program pembangunan pedesaan secara tepat dan sesuai dengan syarat. Syarat yang tidak boleh ditawar harus memiliki banyak keuntungan, baik untuk masyarakat sendiri dan lingkungan sekitar. Berikut beberapa syarat penjangkauan program pembangunan pedesaan:

- 1) Diterima oleh masyarakat setempat.
- 2) Menguntungkan secara ekonomi.
- 3) Memberikan dampak positif untuk lingkungan.

Dari ketiga syarat tersebut, jika dilakukan secara tepat dan efisien akan membantu masyarakat untuk mengerjakan sumber daya alam manusia untuk sadar dengan potensi dan masalah yang mereka hadapi untuk dicarikan solusi. Selain itu juga dapat membantu dalam menganalisis dan membuat program secara sistematis.

Tujuan PRA pada partisipasinya ingin memberdayakan dan menguatkan ekonomi masyarakat. Khususnya masyarakat yang dianggap masih kurang mampu. Dengan adanya metode

¹⁶ Diah Puspaningrum, Titin Agustina, "Pendekatan Participatory Research Appraisal (PRA) Dalam Pengembangan Kopi arabika Specialty Ketinggian Sedang Berbasis Kawasan Di Kabupaten Jember", *Jurnal Agribest* Vol. 01, No. 02, September (2017). 3-4

PRA akan terjadi perubahan status sosial dan dapat menjejahterakan masyarakat itu sendiri.¹⁷

j. Model Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian model pemberdayaan masyarakat memberikan akses kepada masyarakat, lembaga, dan organisasi masyarakat dengan memanfaatkan/memperoleh hak masyarakat bagi peningkatan kualitas hidupnya, karena penyebab ketidak berdayaan masyarakat disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan/keterampilan, serta adanya kondisi kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat.¹⁸

Model pemberdayaan masyarakat meliputi:

1) Model pembelajaran masyarakat

Mempunyai tujuan yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat agar mengenal keberadaan air di alam sehingga masyarakat mampu memilih air sesuai kuantitas dan kualitasnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan.

2) Model pembelajaran ekonomi masyarakat

Mencermati terjadinya adanya krisis ekonomi di Indonesia dibuktikan bahwa telah terjadi kerapuhan dalam sendi-sendi Indonesia secara global yang berujung terhadap tingginya tingkat kemiskinan yang menjadi ancaman yang menjadi konflik sosial di Indonesia.

3) Model pengembangan masyarakat

Menurut Philip H. Combs dan Manjhoor Ahmad, pengembangan masyarakat ada 4 model pendekatan yaitu: pendekatan penyuluhan, model pendekatan pelatihan, pendekatan koperasi swadaya dan pendekatan pembangunan.¹⁹

¹⁷ Ahmad Muhsin, Laila nafisah, “*Participatory Rural Appraisal (PRA) For Corporate Social Responsibility (CSR)*”, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 7-10.

¹⁸ <https://id.scribd.com/document/407327912/model-pemberdayaan-masyarakat> Diakses pada tanggal 28 Juni 2022 Pukul 16:43

¹⁹ <https://id.scribd.com/document/407327912/model-pemberdayaan-masyarakat> Diakses pada tanggal 28 Juni 2022 Pukul 17:00 WIB

2. Batik

Pengertian batik secara etimologi kata batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu “tik” yang berarti titik (kata kerja, membuat titik) yang kemudian berkembang menjadi istilah “batik” (Indonesia Indah “batik”). Di samping itu, batik mempunyai pengertian yang berhubungan dengan membuat titik atau meneteskan malam pada kain mori.²⁰

Menurut Hanggopuro pengertian batik adalah dalam para penulis terdahulu menggunakan istilah batik yang sebenarnya tidak ditulis dengan kata “batik” akan tetapi seharusnya “bathik”. Hal ini mengacu pada huruf Jawa “tha” bukan “ta” dan pemakaian bathik sebagai rangkaian dari titik adalah kurang tepat atau dikatakan salah. Berdasarkan etimologis tersebut sebenarnya batik identik dikaitkan dengan suatu teknik (proses) mulai penggambaran motif hingga pelorodan. Salah satu yang menjadi ciri khas dari batik adalah cara penggambaran motif pada kain melalui proses pemalaman yaitu menggoreskan cairan lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting.²¹

Menurut Hamzuri, batik merupakan suatu cara untuk memberi hiasan pada kain dengan cara menutupi bagian-bagian tertentu dengan menggunakan perintang. Zat perintang yang sering digunakan ialah lilin atau malam. Kain yang sudah digambar dengan menggunakan malam kemudian diberi warna dengan cara pencelupan. Setelah itu malam dihilangkan dengan cara merebus kain. Akhirnya dihasilkan sehelai kain yang disebut batik berupa beragam motif yang mempunyai sifat-sifat khusus. Sedangkan batik sebagai lukisan atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting. Orang yang melukis atau menggambar pada mori memakai canting disebut membatik. Membatik ini menghasilkan batik yang berupa macam-macam motif dan mempunyai sifat khusus yang dimiliki oleh batik itu sendiri.²²

Sedangkan batik tulis adalah dibuat secara manual menggunakan tangan dengan alat bantu canting untuk menerakan malam pada corak batik. Pembuatan batik tulis membutuhkan kesabaran yang tinggi karena setiap titik dalam motif

²⁰ Adhi Prasetyo, “Karakteristik Motif Batik Kendal Interpretasi dari Wilayah dan Letak Geografis”, *Jurnal Imajinasi*, Vol X no 1 Januari 2016, 52-53

²¹ Adhi Prasetyo, “Karakteristik Motif Batik Kendal Interpretasi dari Wilayah dan Letak Geografis”, *Jurnal Imajinasi*, Vol X no 1 Januari 2016, 52-53

²² Adhi Prasetyo, “Karakteristik Motif Batik Kendal Interpretasi dari Wilayah dan Letak Geografis”, *Jurnal Imajinasi*, Vol X no 1 Januari 2016, 52-53

berpengaruh pada hasil akhirnya. Motif yang dihasilkan dengan cara ini tidak akan sama persis. Kerumitan ini yang menyebabkan harga batik tulis sangat mahal.²³

3. Ekonomi

a. Pengertian Ekonomi Masyarakat

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani dari kata “oikos” atau “oiku” dan “nomos” yang berarti aturan rumah tangga. Secara umum, ekonomi merupakan bidang kajian dalam urusan sumber daya materi individu, masyarakat, serta negara dalam meningkatkan kesejahteraan hidup.²⁴ Dikarenakan ekonomi merupakan ilmu tentang tindakan manusia ataupun perilaku manusia guna memenuhi kebutuhan yang sangat bervariasi yang berkembang melalui sumber daya yang ada seperti dalam kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi.

Berikut beberapa pengertian ekonomi menurut ahli.²⁵

1) Adam Smith

Ekonomi adalah penceritaan tentang keadaan sebab adanya kekayaan negara.

2) Mill J.S

Ekonomi adalah pelajaran mengetahui pemasukan dan pengeluaran.

3) Paul A. Samuelson

Ekonomi adalah cara yang dilakukan manusia dan kelompok guna pemanfaatan sumber daya untuk dikonsumsi masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan ekonomi masyarakat adalah suatu tindakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan melalui kegiatan perekonomian. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat menyelesaikan masalah kehidupan terutama dalam ekonomi keluarga. Kebutuhan ekonomi sangatlah penting sehingga masyarakat dapat bangkit dari keterpurukan kemiskinan maupun pengangguran.

²³ <https://eprints.uny.ac.id/27891/2/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 20:00 WIB

²⁴ Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 1.

²⁵ <http://repository.uin-suka.ac.id/6723/4/BAB%20111.pdf> Diakses Pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 21:00 WIB

b. Teori Tentang Ekonomi Diversifikasi Produk

Menurut Tjiptono (2008:132), Pengertian diverifikasi sosial adalah sebagai upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar baru, atau keduanya, dalam mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas.

Menurut Ismanthono (2006:65), diverifikasi produk adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan penjualan melalui pengeanekaragaman produk, batik lewat pengembangan produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada.

Sedangkan menurut Assauri (2007:198), diverifikasi produk dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai akibat dilaksanakannya pengembangan produk, sementara produk lama secara ekonomis masih dapat dipertahankan. Dalam diverifikasi produk, perusahaan berusaha untuk menaikkan penjualan dengan cara mengembangkan produk baru untuk pasar-pasar yang baru, sehingga terdapat bermacam-macam produk yang diproduksi perusahaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa diverifikasi sosial merupakan suatu kebijakan dalam strategi perusahaan untuk memenuhi selera dan kebutuhan konsumen melalui pengeanekaragaman produk dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas dan fleksibilitas dengan jalan menciptakan produk atau jasa baru tanpa bergantung pada satu jenis produk saja. Produk yang beranekaragaman akan membuat konsumen percaya bahwa berbagai kebutuhannya dapat terpenuhi oleh pengusaha itu. Semakin beragam produk yang ditawarkan kepada konsumen, semakin besar pula ketertarikan konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan.²⁶

c. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata menjelaskan tentang konsep ekonomi, tetapi jika dilihat dari sudut pandang pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai demokrasi ekonomi. Secara harfiah demokrasi ekonomi memiliki arti yaitu kedaulatan ekonomi rakyat, dimana

²⁶ Khamidi, S, Fauzi, A, & Suyadi, Pengaruh Diverifikasi Produk Terhadap Penjualan (*Jurnal Universitas Brawijaya Malang*, 2020),1.

berlangsungnya kegiatan ekonomi yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.²⁷

Konsep pemberdayaan menyangkut dari beberapa masalah seperti penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses penjualan, dan keterampilan dalam manajemen. Tercapainya demokrasi ekonomi, dukungan serta aspirasi masyarakat dalam kegiatan sangatlah berperan penting. Dalam proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, namun pemberdayaan kelompok memiliki keutamaan yang lebih banyak dikarenakan mereka dapat berdiskusi dalam memecahkan masalah maupun memberikan masukan.

Dengan demikian pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat melalui swadaya pengolahan sumberdaya yang dimiliki dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Upaya dalam pembangunan ekonomi masyarakat tertuju pada perubahan struktur yaitu memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam ekonomi nasional.

B. Penelitian Terdahulu

Membahas mengenai pemberdayaan masyarakat Islam melalui kerajinan batik sudah tentu banyak membahas mengenai topik ini. Dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian baik berupa karya tulis, buku, tesis, atau apapun yang berhubungan dengan topik yang sama. Akibatnya, sangat penting untuk menggunakan penelitian sebelumnya sebagai titik perbandingan dalam penelitian masa depan. Berikut ini adalah beberapa topik yang pernah saya teliti dan gunakan sebagai bahan referensi di masa lalu:

1. Penelitian oleh Titis Amien Patria dalam penelitian yang berjudul *“Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan batik Solo guna meningkatkan perekonomian keluarga miskin Kec. Laweyan Kab. Solo”*. Universitas Brawijaya, fakultas ilmu administrasi, 2018.

Penelitian ini dilakukan atas dasar meningkatkan perekonomian keluarga miskin dan potensi batik di Indonesia dalam perkembangannya yang terus tumbuh dan berkembang serta berperan penting dalam kehidupan sosial budaya dan

²⁷ Rindiyah Hanafi, *Ekonomi Lingkungan Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan Sekitar Hutan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 11.

sebagai suatu usaha industri. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Kota Solo di kawasan Kampong Batik Laweyan. Teknologi yang dilakukan dengan metode dokumentasi, wawancara dan observasi. Instrumen yang digunakan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, buku catatan dan kamera. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan batik Solo guna meningkatkan perekonomian keluarga miskin berdasarkan permasalahan pemberdayaan masyarakat yaitu sistem kelembagaan ekonomi, akses masyarakat ke input sumber daya, serta membangun organisasi ekonomi masyarakat. Unduk dampak pengembangan batik Solo bagi perekonomian keluarga miskin yaitu dengan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bustanul Aulia dengan judul *“Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kerajinan batik tulis Giriloyo Wukirsari Bantul daerah istimewa Yogyakarta”*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, fakultas ekonomi dan bisnis Islam, 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi ekonomi. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling.

Hasil penelitian ini dapat yaitu pemberdayaan batik di Giriloyo telah melahirkan kelompok-kelompok batik yang tergabung dalam sebuah paguyuban batik Giriloyo. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Giriloyo di sokong oleh beberapa Lembaga pemerintah dan swasta seperti BUMN, Disperindag, Dinas Koperasi Bantul dan beberapa LSM. Melalui kegiatan membatik itu juga mampu melahirkan pasar bebas bagi masyarakat sekitar sehingga dapat membantu perekonomian warga melalui kegiatan berdagang dan aktivitas wisata desa. Pemasaran batik di Giriloyo umumnya menggunakan 2 sistem yaitu sistem online dengan menggunakan sosial media dan website. Sedangkan sistem offline yaitu pemasaran melalui galeri-galeri rumah dan showroom batik. Hal ini dilakukan untuk mencegah maraknya para tengkulak yang sering mempermainkan harga sehingga merugikan para pengrajin sekitar. Dengan kegiatan pemberdayaan batik ini, masyarakat sekitar sedikit terbantu untuk menumbuhkan perekonomiannya sendiri dan tidak

bergantung pada pemerintah. Namun demikian, masih ditemukan faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan ekonomi seperti kurangnya partisipasi pemuda, kesulitan bantuan modal, kurangnya inovasi dan lainnya. Sedangkan peran pemerintah, swasta dan keaktifan warga sekitar menjadi salah satu faktor pendukung dalam pemberdayaan batik di Giriloyo

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian
Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Titis Amien Patria. Universitas Brawijaya Solo 2018 (Skripsi)	Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan batik solo guna meningkatkan perekonomian keluarga miskin Kecamatan Laweyan Kabupaten Solo	Mengenai pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi	Membedakan hanyalah tempat penelitian
2.	Bustaanul Aulia. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018 (Skripsi)	Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kerajinan batik tulis Giriloyo Wukirsasi Bantul daerah istimewa yogyakarta	Mengenai pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi	Membedakan hanyalah tempat penelitian

C. Kerangka Berpikir

Desa Sedo Kecamatan Demak Kabupaten Demak merupakan salah satu desa yang mayoritas usaha tani cabainya cukup mapan yang menunjukkan bahwa potensi yang ada di Desa Sedo cukup meningkatkan perekonomian masyarakat yang sebagian besar adalah petani. Namun disini ada usaha yang meningkatkan

perekonomian yaitu usaha batik yang menunjukkan bahwa potensi yang ada di Desa Sedo cukup berkembang.

Pemberdayaan masyarakat melalui batik dapat meningkatkan potensi yang ada di Desa Sedo untuk mensejahterakan masyarakat agar lebih baik dan unggul sehingga mampu mengembangkan sistem dan sarana pemasaran hasil. Usaha juga harus diberi otonomi yang lebih besar sehingga mereka dapat terus membangun usaha mereka dan mempelajari keterampilan baru untuk menjadi lebih sejahtera.

Berikut ini adalah uraian kerangka penelitian, yang menguraikan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan didasarkan pada temuan penelitian, rumusan masalah, dan berbagai hipotesis pendukung yang dikemukakan di latar belakang. Studi ini akan dilakukan sesuai dengan pedoman berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

**Desa Sedo Kecamatan Demak
Kabupaten Demak**



**Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat pada Kerajinan
Batik Tulis**



**Meningkatnya Perekonomian
Masyarakat**